KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

TW I Tahun 2026

DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha penangkapan Ikan periode Triwulan I Tahun 2026 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 15 Aprili 2026

Direktur Usaha Penangkapan Ikan
Ukon Ahmad Furkon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Maksud dan tujuan	
1.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
1.4	Sumber Daya Manusia	
1.5	Sistematika Penyajian	
BAB 2	Perencanaan Kinerja	
2.1	Renana Strategis 2020 - 2024	
2.2	Perjanjian Kinerja	
2.3	Sasaran, Indikator, Target kinerja dan Anggaran	
2.4	Rencana Aksi Penetapan Kinerja	
BAB 3	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Capaian Kinerja	
3.2	Analisis Capaian Kinerja	
3.2.1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan	
	IKU 1 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pangangkutan ikan	
	IKU 2 Dokumen perizinan berusaha sub sektor pananghkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	
	IKU 3 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	
	IKU 4 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	
	IKU 5 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	
	IKU 6 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	
	IKU 7 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	
3.2.2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 8 Indeks profesioanlitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 9 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Usaha Penankapan Ikan	
	IKU 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	

	perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 11 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 12 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
3.3	Akuntabilitas Keuangan	
	Penutup	

Daftar Tabel

TABEL 1 RENCANA KINERJA DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN TAHUN 2025

TABEL 2 KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2025

TABEL 3 RENCANA AKSI IKU TAHUN 2025

TABEL 4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN (SK) DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN TW II TAHUN 2025

TABEL 5 ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 6 PERBANDINGAN CAPAIAN ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 7 DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKUTAN IKAN YANG DITERBITKAN

TABEL 8 PERBANDINGAN CAPAIAN DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI

TABEL 10 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI

TABEL 11 INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 12 PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR

TABEL 13 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR

TABEL 14 PERSENTASE KETERSEDIAAN AKSES APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 15 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE KETERSEDIAAN AKSES APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 16 PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 17 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

TABEL 18 INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN LINGKUP DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN

TABEL 19 NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DIT. UPI

TABEL 20 PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

TABEL 21 NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

TABEL 22 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

TABEL 23 PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

TABEL 24 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TW II TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. UPI
GAMBAR 2 DASHBOARD CAPAIAN KINERJA DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN
GAMBAR 3 DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU CAPAIAN TRIWULAN I DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana Direktorat ini dibentuk berdasarkan Kepmen KP No.2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.030.515 000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2026 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2026 Tanggal 01 Desember 2025. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2026, memiliki 2 Sasaran Kegiatan yaitu Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan dan Terwujudnya dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorta Usaha Penangkapan Ikan. Adapun sasaran kegiatan ini didukung oleh 12 Indikator Kinerja Utama. Yaitu (1) Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (Alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (6) Persentase ketersediaan system layanan usaha penangkapan, (7) Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan (8) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (9) Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (11) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (12) Persentase penyerapan anggaran lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang dimana hasil dari pengukuran diperoleh capaian sebesar 108,83%. Adapun hasil dari pengukuran ini nantinya dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Adapun langkah langkah perbaikan kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja juga dilakukan secara periodik.

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional "Kemaritiman dan Kelautan" dan "Kedulatan Pangan", maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimakud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni "Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional", dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan tetap menjunjung aspek akuntabiltas dan trasnparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2026, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029 dan RKP tahun 2026. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan secara bertahap dari triwulan 1 sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2026.

1. 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2026 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkiutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaran perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan dan penyelenggaran perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap ;
4. Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pengelolaan dan penyelenggaran perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan dan penyelenggaran perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Adapun susunan organisasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

a. **Tim Kerja Penyelenggaraan Perizinan**,
b. **Tim Kerja Pemantauan dan Analisis Perizinan**
c. **Tim Kerja Harmonisasi Perizinan**
d. **Tim Kerja Digitalisasi dan Integrasi Usaha Penangkapan Ikan**
e. **Kasubag Tata Usaha** ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Mahir
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
- Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Muda
- Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
- Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan ahli muda

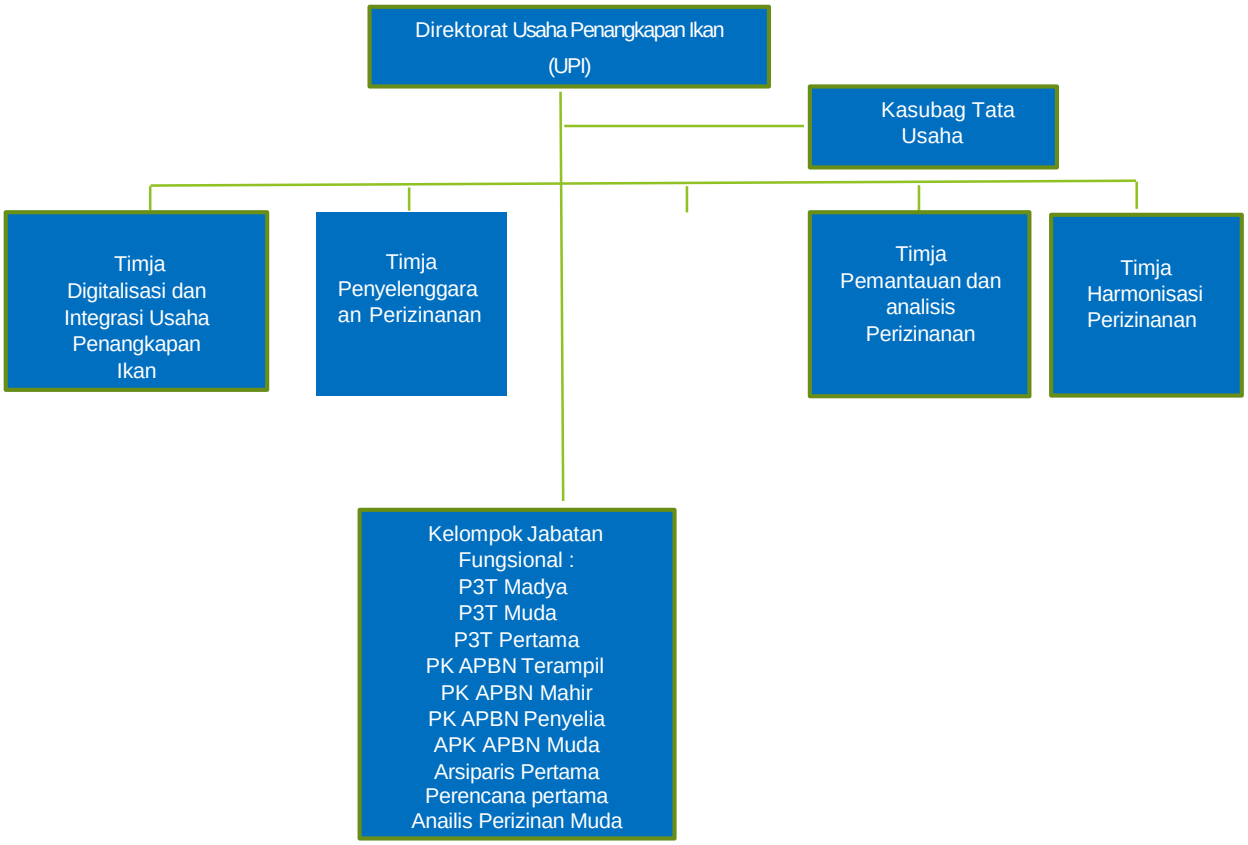

Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. UPI

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulanan sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. **Bab IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. **Lampiran**

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Usaha Penangkapan Ikan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2029

Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari Upaya mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045** yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, Pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengurangana ketimpangan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama Pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi struktural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi. (2) Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan Tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinana ekstrem pada 2026. (3) Pengembangan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan Sektor kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis Kepentingan Nasional”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan yang sederhana dan terintegrasi;
2. Melakukan harmonisasi dan pemantauan perizinan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi
3. Menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Moto dan maklumat pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki MOTO '***Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi*** '. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Usaha Penangkapan Ikan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2025 – 2029, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2026. Dimana pada Tahun 2026 ini, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan telah menetapkan sasaran kegiatan (SK) sebanyak 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama sebanyak 12 IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Usaha Penangkapan Ikan. Adapun 12 IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Rencana Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (alokasi kapal)	13.000
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	10.000
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	92
		4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor pengankapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3,3
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	92
		6	Persentase ketersediaan system layanan usaha penangkapan	97
		7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan	100
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	84,5
		9	Penilaian Maandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,2
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	86
		11	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,8
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98,6

Pada Tahun 2026 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp. 4.030.515.000.,-. Nilai ini lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi pengalokasian anggaran ditiap – tiap KL. Adapun rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.000)
1	Izin berusaha sub sektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	199.917
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	285.050
3	Pemerintah daerah yang difasilitasi perizinan berusahanya	522.330
4	Rekomendasi kebijakan usaha penangkapan ikan	542.247
5	Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Perikanan	226.349
6	Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya	1.475.113
7	Usaha penangkapan ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	409.453
8	Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitaliasi dan terintegrasi	370.056
TOTAL		**4.030.515**

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	- Identifikasi analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan. - Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan - Penyusunan/reviu pedoman penataan perizinan untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) - Dukungan kegiatan penerpan penarikan

		PNBP pascaproduksi
		- Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur - Penerbitan izin usaha penangkapan ikan - Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah - Analisis laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkpan (LKP)
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimbingan tekhnis dan pelatihan – pelatihan , - Memberikan kesempatan kepada pegawai lingkup Dit. UPI untuk mengikuti program tugas ataupun ijin belajar. - Melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP - Memanfaatkan media social dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dit. UPI Berpartisipasi Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan - Melaksanakan tindak lanjut dari setiap hasil temuan pengawasan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, terdapat 2 (Dua) sasaran kegiatan dan 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 seperti pada gambar berikut:

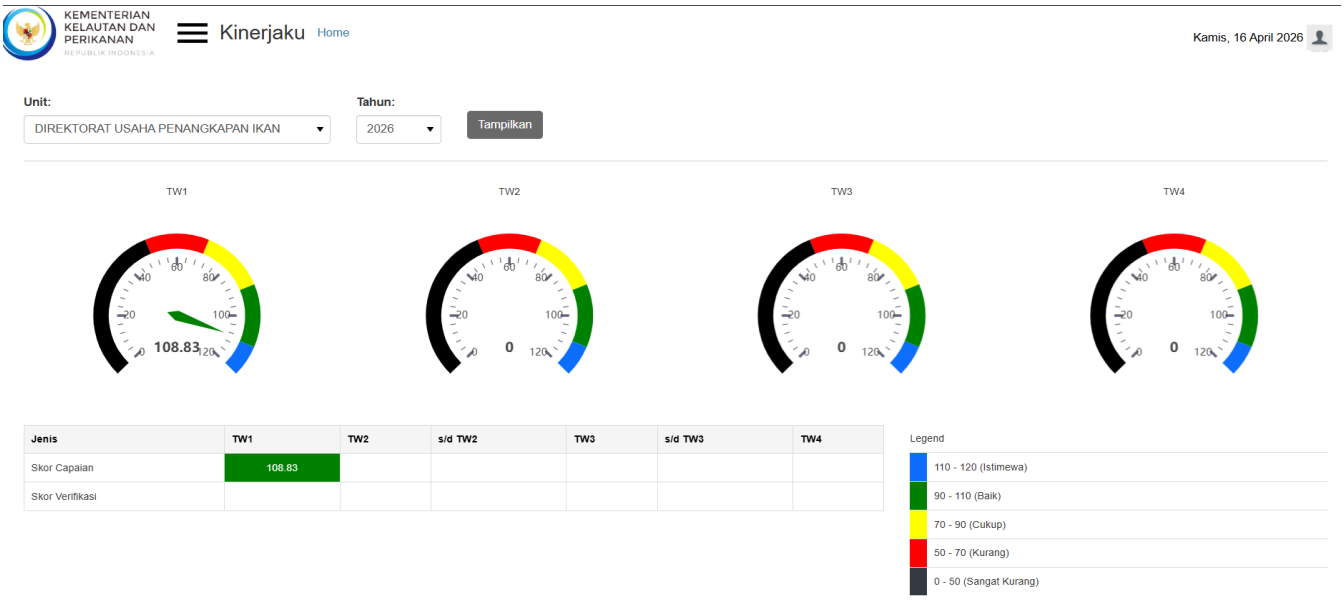

Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memperoleh nilai sebesar 108,83**%.**,Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki 2 Sasaran kegiatan dan 12 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan pada periode Triwulan I Tahun 2026 sudah baik. Hal ini bisa kita lihat dari pencapaian indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerjaku yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, Triwulan I, Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	CAPAIAN 2024	
					Triwulan I	% thd Target
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	13.000	3275	25,19
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	10.000	5038	50,38
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	92	(semesteran)	(semesteran)
		4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3,3	(tahunan)	(tahunan)
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	92	89,19	96,95
		6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan	97	99,37	102,44
		7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan	100	100	100
	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks Profesioanlitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	84,5	(Semesteran)	(semesteran)
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,2	(tahunan)	(tahunan)
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	86	100	116,28
		11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,8	89,02	100,25
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	98,6	(tahunan)	(tahunan)

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (6) Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan, (7) Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan. Adapun capaian indikator dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan yaitu aplikasi SIMKADA, E-Pit dan aplikasi SILAT. *Permasalahan* yang terjadi saat ini adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi para stakeholder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Dan yang terbaru saat ini adalah adanya aplikasi E-PIT yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Dimana aplikasi ini menitik beratkan pada penangkapan ikan terukur. Sampai saat ini aplikasi ini juga masih terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

1. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Adapun keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi.

Tabel. 5 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan

Satuan : alokasi kapal

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	13.000	3.275	25,19

Tabel. 6 Perbandingan capaian Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan											
IKU 1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan											
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Thn. 2026	Target TW I	Realisasi Tahun 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian TW I thd target akhir Renstra (16000)
9230	9767	11344	3901	2795	13000	3250	3275	100,77	25,19	13000	20,47

Dari tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian pada triwulan I tahun 2026, masih lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama. Namun jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya capaian IKU ini mengalami trend naik turun . Pencapaian tertinggi diperoleh di tahun 2023 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan perbedaan perolehan data yang dilakukan dan perubahan kebijakan dalam proses perizinan. Adapun grafik capaian dapat dilihat pada gambar dibawah.

grafik capaian di atas menunjukkan adanya trend capaian yang naik turun. Di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan trend capaian yang tiap tahun mengalami kenaikan kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan begitu juga pada tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya perubahan penerapan kebijakan terhadap perizinan. Perubahan regulasi yang mengatur izin usaha penangkapan ikan.

2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan .

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi . Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan). Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT.

Tabel. 7 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	10.000	5.038	50,38

Tabel.8 Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan .

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan											
IKU 2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan											
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Thn. 2026	Target TW I	Realisasi Tahun 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian TW I thd target akhir Renstra (13000)
5481	6274	6757	4380	2653	10000	2500	5038	201,52	50,38	10000	38,75

Dari table perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini juga mengalami trend naik turun. Kenaikan capaian terjadi pada tahun 2021-2023, sedanngkan di tahun 2024 mengalami penurunan berlanjut sampai dengan tahun 2025 pada periode yang sama. Kemudian ditahun 2026 kembali mengalami kenaikan hamper 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.

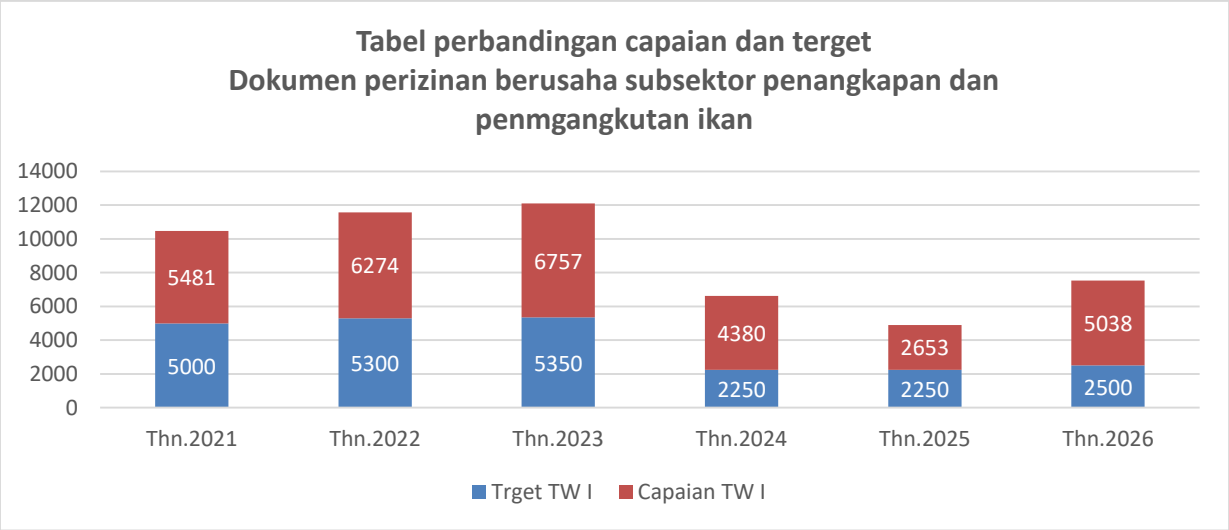

3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi hasil analisis perizinan yang ditindaklanjuti berupa permohonan suspend kapal. Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga pada periode triwulan I belum diperoleh capaian.

Tabel.9 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	92	-	-

4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil resiko. Tingkat profil resiko menunjukkan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Semakin tinggi profil risiko, maka tingkjat kepatuhan semakin rendah.

Analisis profil risiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

1. Kepemilikan asset wajib bayar
2. Kepatuhan dalam penyampaian laporan produksi
3. Ketepatan waktu pembayaran PNBP.

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil resiko sbb :

- Nilai total skor ≤ 1 = Risiko sangat rendah
- Nilai total skor > 1 – 2 = Risiko rendah
- Nilai total skor > 2 – 3 = Resiko sedang
- Nilai total skor > 3 – 4 = Risiko tinggi
- Nilai total skor > 4 – 5 = Risiko sangat tinggi

Dari penilaian profil risiko tersebut selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia (Izin pusat) dengan menghitung persentase seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan.

Tabel.11 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penankapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : skala/nilai

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3,3	-	-

Adapun periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga pencapaian IKU pada periode triwulan I belum dapat dilaporkan.

5 . Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur adalah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap.

Pada periode triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan fasilitasi perizinan daerah di 33 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Paapua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Dengan total sebanyak 2605 ijin kapal.

Tabel.12 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	92	89,19	96,95

Adapun capaian IKU Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan gubernur adalah sebesar 89,19% atau sebesar 96,95% dari target tahunan.

Tabel.13 Perbandingan capaian persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaanperizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur .

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan											
IKU 5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.											
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 202I	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Thn. 2026	Target TW I	Realisasi Tahun 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian TW I thd target akhir Renstra (95)
100	91,2	79,41	91,9	94,6	92	91	89,19	98,01	96,95	92	93,88

Dari table perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini juga mengalami naik turun. Dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2021 pada periode yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh nilai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk target tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi persentase capaian akhir IKU.

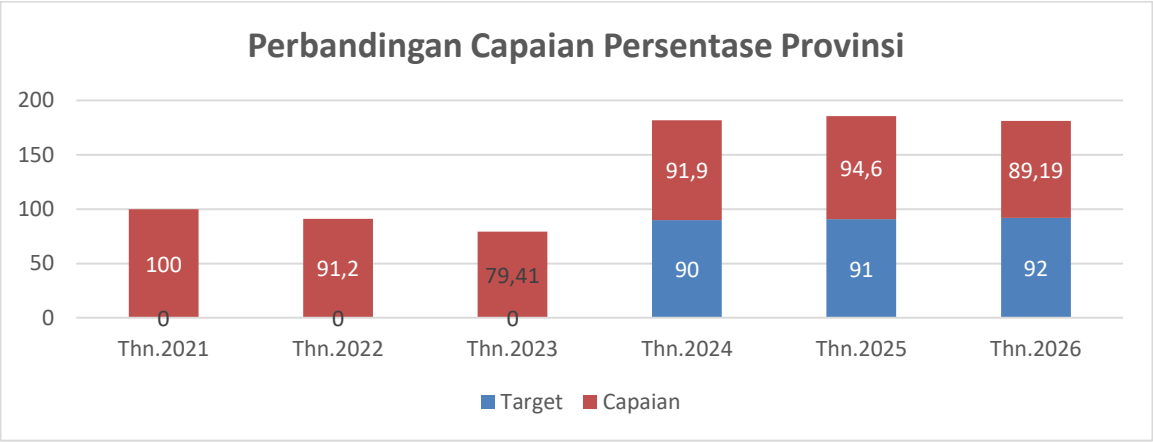

6 . Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan ikan angkutan ikan .

Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penagkapan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi. Adapun aplikasi layanan perizinan yang digunakan seperti Web perizinan, Portal ePIT Mgmt, Portal Epit, aplikasi SIMKADA, dan aplikasi SILAT. Adapun capaian IKU Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sampai dengan triwulan I adalah 99,37% atau sebesar 104,6% dari target.

Tabel.14 Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase ketersediaan layanan usaha penangkapan ikan	95	99,37	104,6

Tabel.15 Perbandingan capaian persentase ketersediaan system layanan usaha penangkapan

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan											
IKU 6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan											
Realisasi Tahun 2021-2025						Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Thn. 2026	Target TW I	Realisasi TW I 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian TW I thd target akhir Renstra (100)	
-	-	-	100	66,34	97	50	99,22	198,44	102,29	97	99,22	

Dari tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa IKU hanya ada di tahun 2024 - 2026 sehingga capaian IKU hanya dapat dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 capaian IKU berada di angka 100% kemudian di tahun berikutnya capaian mengalami penurunan secara drastis. Dimana capaian ini hanya mampu di angka 66,34%. Selanjutnya di tahun 2026, capaian ini kembali naik menjadi 99,22%. Capaian yang cukup baik. Adapun penurunan capaian yang terjadi di tahun 2024 disebabkan karena pada saat itu kerjasama antara Direktorat UPI dengan penyedia layanan aplikasi sudah berakhir sehingga system layanan aplikasi mengalami gangguan dan berimbas pada capaian kinerja.

7. Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan .

Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA center atau melalui CRM tawk.to yang selanjutanya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Adapun total pengaduan yang masuk selama triwulan I (per.Januari – Maret) adalah sebanyak 1455 pengaduan dan ditindaklanjuit dan diselesaikan sebanyak 1455 pengaduan. Ini berarti bahwa semua pengaduan yang masuk dapat diselesaikan semua. Dengan demikian capaian IKU ini diperoleh capaian sebesar 100%. Adapun pengaduan yang masuk seperti kendala akun e-PIT, kendala akun SICEFI, SIPALKA dan SIKAPI, kendala aplikasi OSS, kendala akun SILAT, kendala aplikasi SILAT dan kendala aplikasi e-PIT.

Tabel.16 Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan .	100	100	100

Tabel.17 Perbandingan capaian Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan											
IKU 7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan											
Realisasi Tahun 2021-2025						Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025		Target Thn. 2025	Target TW I	Realisasi TW I 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian TW IV thd target akhir Renstra (100)
-	-	-	100	100		100	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini selalu tercapai 100% pada periode yang sama. Sama dengan IKU sebelumnya, IKU ini juga hanya terdapat di tahun 2024 – 2026, sehingga capaian IKU ditahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3.2.2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 6 (Enam) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (2) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (3) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (5) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (6) Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan keneayanan.

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks professionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

(1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatam kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .

(2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai komptensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut : (a) Pejabat Struktural dihitung dengan kompenen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.

(3) **Kinerja**. Berupa nilai SKP Pegawai

(4) **Hukuman Disiplin**, berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan I belum dapat dilaporkan.

Tabel. 18 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	84,5	-	-

2. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagaan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja).

Adapun ***capaian*** nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Usaha Penangkapan Ikan pada triwulan I belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Tabel 19. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I 2026	%
Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,2	-	-

3. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025.

Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan tidak terdapat temuan yang menjadi objek pengawasan sehingga capaian IKU bisa di klaim 100%..

Tabel. 20 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian Triwulan I	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	86	100	116,28

Tabel. 21 Perbandingaan persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan											
IKU 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingku Dit. Usaha Penangkapan ikan											
Realisasi Tahun 2021-2025						Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025		Target Thn. 2026	Target TW I	Realisasi TW I Tahun 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian TW I Tahun 2026 thd target akhir Renstra (89)
-	100	11,11	95	60		86	86	100	116,28	116,28	86	112,36

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capain IKU ini mengalami trend naik turun. Dimana capaian terendah terjadi di tahun 2023 yang hanya mencapai 11,11%. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil temuan. Selanjutnya di tahun berikutnya yakni tahun 2024, capaian IKU ini naik drastis hingga mencapai 95%. Hal ini tidak lepas dari penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil temuan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya di tahun selanjutnya capaian ini kembali turun di angka 60%. Hal ini disebabkan karena adanya rekomendasi hasil temuan yang belum ditindaklanjuti.

4. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyrakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 89,02 atau sebesar 100,25% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Tabel. 21 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha penangkapan Ikan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,8	89,02	100,25

Tabel. 22 Perbandingaan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan											
IKU 11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan											
Realisasi Tahun 2021-2025						Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target Thn. 2026	Target TW I	Realisasi TW I Tahun 2026	Realisasi thd target TW I Thn 2026	Realisasi thd target Thn. 2026	Target Renstra 2026	% capaian Tahun 2025 thd target akhir Renstra (89)
-	-	-	88,97	88,57	88,8	88,8	89,02	100,25	100,25	88,8	100,25

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa IKU ini juga baru ada di tahun 2024 – 2026 sehingga capaian di tahun sebelumnya tidak dapat dilaporkan. Adapun capaian IKU juga mengalami trend naik turun. Namun demikian capaian tahun ini pada periode yang sama, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan semakin meningkat.

5. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, dimana Tahun 2026 ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara besar – besaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya mengalami perubahan baik secara anggara maupun secara volume.

Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan.

Tabel. 23 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98,8	-	-	-

Adapun capaian persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada triwulan I belum dapat dilaporkan Karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.030.515.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-DIPA-032.03.1.238720/2026 tanggal 01 Desember 2025. dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 523.353.861,- juta atau sebesar 12,98% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2026, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026, Berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	199.917.000,-	47.413.170,-	23,72
2.	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	285.050.000,-	80.305.000,-	28,17
3.	Rekomendasi penerimaan pemungutan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan	226.349.000,-	39.265.600,-	17,35
4	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan	542.247.000,-	179.880.526,-	33,17
5	Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya	1.475.113.000,-	-	-
6	Usaha penangkapan ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	409.453.000,-	70.020.012,-	17,10
7	Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	370.056.000,-	2.628.000,-	0,71
8	Pemerintah yang difasilitasi perizinan berusahanya	522.330.000,-	103.841.553,-	19,88
	TOTAL	**4.030.515.000,-**	**523.353.861,-**	**12,98**

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar 108,83 persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.

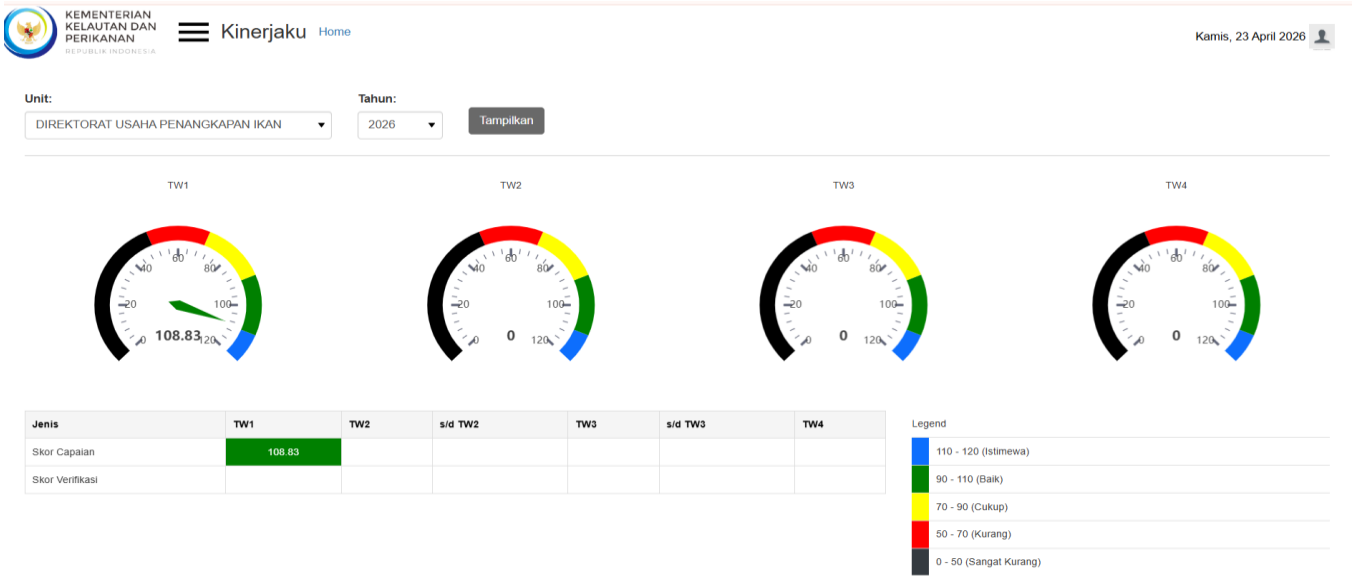

Gambar 3

Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026

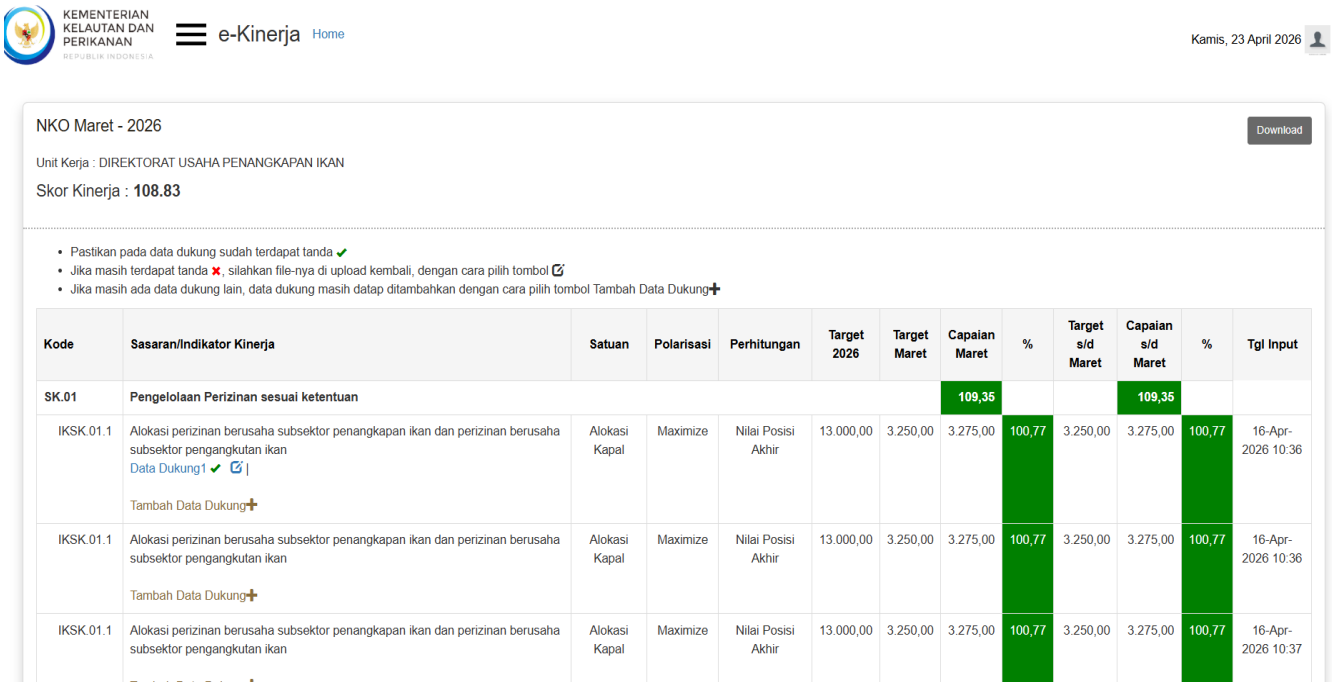

IKSK.01.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Tambah Data Dukung+	Alokasi Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	13.000,00	3.250,00	3.275,00	100,77	3.250,00	3.275,00	100,77	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Tambah Data Dukung+	Alokasi Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	13.000,00	3.250,00	3.275,00	100,77	3.250,00	3.275,00	100,77	16-Apr-2026 10:38
IKSK.01.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Data Dukung1 ✔ | Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	2.500,00	5.038,00	120,00	2.500,00	5.038,00	120,00	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	2.500,00	5.038,00	120,00	2.500,00	5.038,00	120,00	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	2.500,00	5.038,00	120,00	2.500,00	5.038,00	120,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	2.500,00	5.038,00	120,00	2.500,00	5.038,00	120,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Tambah Data Dukung+	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	2.500,00	5.038,00	120,00	2.500,00	5.038,00	120,00	16-Apr-2026 10:38
IKSK.01.3	Persentase Rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.3	Persentase Rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Tambah Data Dukung+	Nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,30	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Tambah Data Dukung+	Nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,30	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Tambah Data Dukung+	Nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,30	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Data Dukung1 ✔ | Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	91,00	89,19	98,01	91,00	89,19	98,01	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	91,00	89,19	98,01	91,00	89,19	98,01	16-Apr-2026 10:38
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan Data Dukung1 ✔ | Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	50,00	99,37	120,00	50,00	99,37	120,00	16-Apr-2026 10:36

IKSK.01.7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:38
SK.02	**Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan**						**108,30**			**108,30**		
IKSK.02.8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,50	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.02.8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,50	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.02.8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,50	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:37
IKSK.02.8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,50	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:37
IKSK.02.8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,50	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:38
IKSK.02.9	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,20	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.02.9	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,20	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:38
IKSK.01.7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan Data Dukung1 ✔ | Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	90,00	100,00	111,11	90,00	100,00	111,11	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:36
IKSK.01.7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.01.7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.0210	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:38
IKSK.0211	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✔ | Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,80	88,80	89,02	100,25	88,80	89,02	100,25	16-Apr-2026 10:36
IKSK.0211	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,80	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:36
IKSK.0211	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,80	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.0211	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,80	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:37
IKSK.0211	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,80	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	16-Apr-2026 10:38
IKSK.0212	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,60	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36

IKSK.0212	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,60	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:36
IKSK.0212	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,60	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:37
IKSK.0212	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,60	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:37
IKSK.0212	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,60	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2026 10:38

Tutup

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sudah baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna hijau pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti baik (*gambar dashboard kinerjaku)*.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
   a. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
   b. Direktorat Usaha Penangkapan ikan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :
   a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
   b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
   c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

DATA DUKUNG CAPAIAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Usaha Penangkapan Ikan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan I, Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I, Tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan I, Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran
Nomor : 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan I
Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2026	Triwulan I	Persentase (%)
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	13.000	3275	25,19
		2	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	10.000	5038	50,38
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	92	(semesteran)	(semesteran)
		4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3,3	(tahunan)	(tahunan)
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	92	89,19	96,95
		6	Persentase ketersediaan sistem layanan usaha penangkapan	97	99,37	102,44
		7	Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan ikan	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2026	Triwulan I	Persentase (%)
2	Terwujudnya layanan Dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan(Indeks)	84,5	(semesteran)	(semesteran)
		9	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,2	(Tahunan)	(Tahunan)
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	86	100	116,28
		11	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (Indeks)	88,8	89,02	100,25
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98,6	(tahunan)	(tahunan)

Lampiran
Nomor : 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

a. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 1. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (alokasi kapal). Data dukung dapat dilihat pada link https://acesse.one/29eg0cg

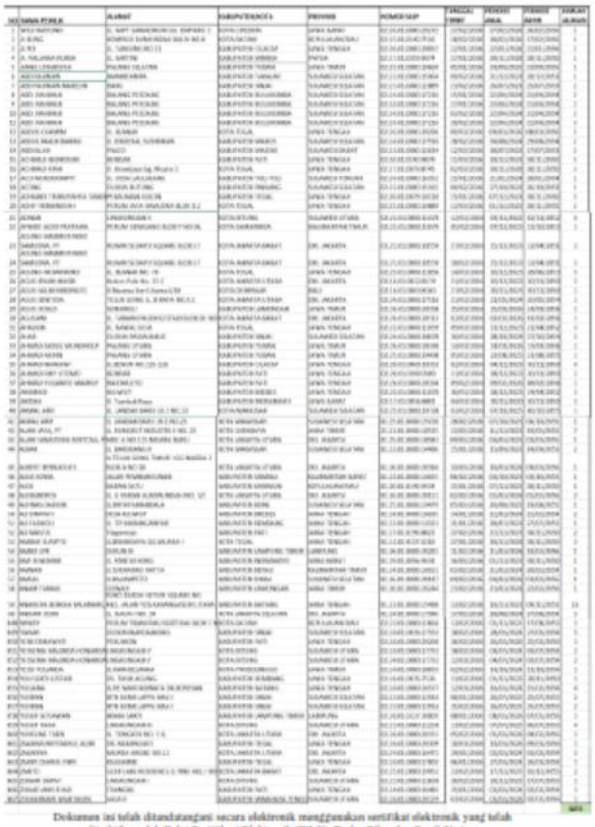

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

b. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen). Data dukung dapat dilihat pada link https://acesse.one/29eg0cg

Lampiran
Nomor : 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

c. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 5. Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

d. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

DATA PERSENTASE KETERSEDIAAN APLIKASI TAHUN 2026

NO	BULAN	APLIKASI				
		SIMKADA	SILAT	WEB PERIZINAN	E - PIT	%
1	JANUARI	98,49	98,49	99,26	100,00	99
2	FEBRUARI	98,49	98,49	99,26	100,00	99,06
3	MARET	100	100	100	100	100
TOTAL		98,99	98,99	99,50	100,00	99,37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UPTIME ROBOT TRIWULAN : [KETERSEDIAAN APLIKASI]

UPTIMEROBOT JANUARI 2026

UPTIMEROBOT FEBRUARI 2026

UPTIMEROBOT MARET 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

e. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 7. Persentase tindak lanjut layanan konsultasi usaha penangkapan.

DATA PERMINTAAN PEMANDANAN DI KTHB DIM TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Bulan	Total Pengaduan Masuk	Total Pengaduan Selesai	Total Pengaduan Tidak Selesai	Persentase (%)
1	Januari	621	621	0	100,00
2	Februari	447	447	0	100,00
3	Maret	597	597	0	100,00
GRAND TOTAL		1.665	1.665	0	100,00

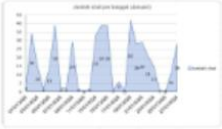

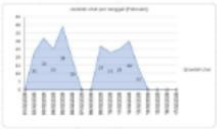

f. SK2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 71/DJPT.5/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

f. SK2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 11. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Lampiran
Nomor : 98/DJPT.1/DT.710/IV/2026
Tanggal : 9 April 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,710	3,711	3,675	3,699	3,711	3,741	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,669	3,705	3,750	3,705	3,603	3,719	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,741	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,559	3,562	3,554	3,537	3,520	89,02
PPN Ambon	68	3,776	3,676	3,705	3,690	3,755	3,667	3,637	3,765	3,816	95,16
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,690	3,724	3,629	3,666	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,697	3,702	3,713	3,741	3,627	3,520	92,57
PPN Kejawanan	153	3,654	3,725	3,608	3,654	3,634	3,699	3,706	3,624	3,641	91,88
PPN Palabuhanratu	450	3,676	3,696	3,616	3,642	3,716	3,702	3,609	3,709	3,773	93,44
PPN Pelabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,675	3,711	3,662	3,723	92,38
PPN Pekalongan	68	3,907	3,837	3,808	3,897	3,894	3,884	3,907	3,849	3,803	96,19
PPN Prigi	126	3,744	3,795	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,862	3,698	92,38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara